



TANDA TANDA ZAMAN

Keluar dari Pakem Trump, Xi Jin Ping, Prabowo

KLAUS HEINRICH RADITIO

Kecamatan Pakem terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif sudah berdiri sejak 1921. Pakem adalah rumah untuk situs-situs pariwisata, budaya, dan religi yang sangat eksotik di lereng Gunung Merapi.

Lukisan karya Drs. Subandi Glyanto

Udara sejuk dan suasana pedesaan yang khas menjadi sahabat natural bagi tubuh dan jiwa. *Manunggaling Kawula Gusti* terasa konkret ketika kita berada di Pakem karena Sang Pencipta, melalui alam ciptaannya, merangkul manusia.

Pakem menjadi rumah bagi situs religi Sumur Kitiran Mas yang tidak pernah surut membagikan air, ibarat kasih ibu yang tak lekang sepanjang zaman. Pakem juga menjadi rumah bagi situs budaya Omah Petroek yang menjadi tempat penyelenggaraan Sekolah Basis untuk memancing daya kritis masyarakat. Dua situs ini hanya sedikit contoh dari begitu banyak situs budaya, religi, dan wisata yang membuat Pakem menjadi rujukan bagi manusia untuk hidup selaras dengan alam. Singkat kata, *pakem* identik dengan semua kualitas yang kita temukan di Kecamatan Pakem: keselarasan dengan alam, norma sosial yang terjaga, dan kesinambungan tradisi dan budaya.

Entah apa yang menjadi latar belakang nama "Pakem". Istilah yang sama juga ditemukan dalam Bahasa Indonesia. Penulis yakin bahwa kata *pakem* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah serapan dari bahasa Jawa. Menurut KBBI, *pakem* memiliki dua makna. Pertama, *pakem* berarti kuat mencekam (tentang rem), seperti dalam kalimat "rem sepeda motor itu sangat pakem." Kedua, *pakem* bermakna cerita wayang yang asli. Makna kedua inilah yang sering dipakai dalam bahasa sehari-hari sebagai sinonim dari kata "norma" atau "kelaziman". *Media Indonesia* dalam reportase tanggal 14 Januari 2025 tentang kasus dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDIP dengan judul "KPK Terkesan Keluar (dari) Pakem". Istilah "keluar dari pakem" dipahami masyarakat sebagai sesuatu yang berbeda dari norma atau kebiasaan khalayak umum.

Tulisan ini berusaha mengidentifikasi "pakem" dengan deskripsi tentang kondisi Kecamatan Pakem di atas. "Pakem" berarti keselarasan dengan norma, kesinambungan dengan tradisi. Alih-alih bermakna inovatif, kreatif, atau *out of the box*, "keluar dari pakem" dalam tulisan ini bermakna acak, revisionis, dan tidak disiplin.

Secara spesifik, artikel ini akan menyoro tiga fenomena keluar dari pakem yang tampaknya akan kuat mewarnai tahun 2025 dan selanjutnya, yaitu kebijakan Presiden Donald Trump yang baru dilantik, gaya pemerintahan Xi Jinping, dan kebijakan luar negeri

Indonesia di bawah Presiden Prabowo. Apakah keluar dari pakem menjadi tanda-tanda zaman yang patut dicermati? Apakah keluar dari pakem akan menjadi pakem yang baru pada tahun 2025?

Trump dan kejutan-kejutannya

Semestinya publik internasional sudah dapat memperkirakan arah kebijakan Trump berdasarkan pemerintahannya pada tahun 2017-2021. Sayangnya, Trump adalah pemimpin yang sulit ditebak, dan tampaknya keluar dari pakem menjadi model dasar pemerintahannya. Penerapan 10% tarif untuk komoditi impor dan tambahan tarif 60% khusus untuk komoditi China adalah rencana yang sudah disampaikan dalam kampanye sepanjang tahun 2024.

Demikian juga dengan penandatanganan *Executive Orders* pada hari pertama setelah pelantikan sebagai Presiden ke-47 AS tidak terlalu mengejutkan, seperti penarikan diri Amerika Serikat (AS) dari Peretujuan Iklim Paris serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Langkah-langkah ini merupakan kebijakan Trump periode pertama yang akan dieksekusi kembali pada periode kedua.

Walaupun kebijakan-kebijakan di atas sangat disayangkan, namun tidak ada yang lebih mengejutkan selain rencana Trump untuk menguasai Greenland yang merupakan wilayah Kerajaan Denmark dengan alasan kepentingan nasional. Kepada publik, Trump

“

Apa yang Trump sampaikan tentang Greenland sudah keluar jauh dari pakem. Jika opini Trump ini menjadi rencana yang terealisasi, ketertiban dunia berada di bawah ancaman besar dan muruah AS sebagai negara adidaya yang bertanggung jawab tidak dapat dipertahankan.

menyampaikan bahwa rakyat Greenland yang berjumlah 57.000 tidak menyukai Kerajaan Denmark. Mereka lebih memilih untuk bergabung dengan AS. Selain itu, Trump juga menegaskan bahwa ia tidak mengesampingkan opsi penggunaan kekerasan untuk menguasai Greenland.

Pernyataan Trump ini merupakan pelanggaran terhadap norma internasional. Pertama, dengan menyampaikan opini pribadinya tentang sentimen rakyat Greenland terhadap Kerajaan Denmark, Trump dapat dikategorikan mencampuri urusan domestik negara lain. Tidak elok dan tidak etis bagi pemimpin negara asing untuk beropini tentang apa yang dirasakan oleh rakyat negara tertentu terhadap pemerintahannya, sekalipun jika informasi tersebut didapatkan melalui metode yang ilmiah. Apalagi dalam hal ini, pendapat Trump tentang pandangan rakyat Greenland didasarkan pada penilaian pribadi semata.

Kedua, pernyataan Trump bahwa dia tidak mengesampingkan kekuatan militer untuk merebut Greenland merupakan tindakan yang sembrono dan tidak bertanggung jawab. Sebagai pemimpin negara adidaya, Trump seharusnya menunjukkan sikap sebagai penjaga norma dan tatanan internasional yang adil dan tertib. Bagaimana AS dapat mengancam operasi militer Rusia ke Ukraina jika pemerintahan Trump sendiri tidak menghormati kedaulatan Kerajaan Denmark atas Greenland? Bagaimana AS dapat mengkritik tindakan asertif China di Laut China Selatan dan Laut China Timur jika pemerintahan Trump sendiri tidak menghormati prinsip hukum internasional yang paling dasar, yaitu penghormatan terhadap kedaulatan negara lain? Apakah Trump tidak pernah belajar bahwa konflik antarbangsa yang terjadi sejak masa lampau umumnya disebabkan oleh kurangnya hormat terhadap kedaulatan negara lain?

Apa yang Trump sampaikan tentang Greenland sudah keluar jauh dari pakem. Jika opini Trump ini menjadi rencana yang terealisasi, ketertiban dunia berada di bawah ancaman besar dan muruah AS sebagai negara adidaya yang bertanggung jawab tidak dapat dipertahankan.

Xi Jinping yang keluar jalur

Sekarang kita beralih ke negara adidaya lain yang merupakan rival AS, yaitu China. Sama dengan Trump, Xi Jinping – sebagai Kepala Negara dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) – juga gemar melakukan hal-hal yang keluar dari pakem. Sejak

menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKC tahun 2012, Xi menekankan ideologi marxisme dan leninisme di atas reformasi dan keterbukaan – yang menjadi kampanye utama para pemimpin China sejak Deng Xiaoping. Sejak memimpin China, Xi Jinping membuat beberapa kebijakan yang keluar dari pakem yang ditetapkan oleh Deng Xiaoping dan diteruskan dengan setia oleh Jiang Zemin dan Hu Jintao.

Pertama, Xi Jinping merumuskan idenya dalam sebuah kompilasi yang disebut sebagai "Pemikiran Xi Jinping". Penamaan "Pemikiran Xi Jinping" merupakan usaha untuk menegaskan legasi Xi Jinping yang setara dengan Mao Zedong – yang juga merumuskan ajarannya dalam sebuah kompilasi bertajuk "Pemikiran Mao Zedong". Deng Xiaoping, Jiang Zemin, dan Hu Jintao tidak mendapatkan keistimewaan tersebut. Pemikiran Xi Jinping telah dicantumkan dalam Konstitusi PKC dan Konstitusi Negara.

Kedua, Xi Jinping menghapuskan pakem (norma tidak tertulis) tentang kepemimpinan kolektif dalam Komite Tetap Politbiro PKC. Jika sebelumnya Sekretaris Jenderal hanya menjadi *primus inter pares* dalam Komite Tetap Politbiro, kini Xi Jinping menjadi pemimpin inti (*core leader*). Ini berarti kepemimpinan PKC menjadi lebih hierarkis dan terpusat pada satu figur.

Ketiga, Xi Jinping, melalui tangan Kongres Nasional Rakyat China, menghapuskan pakem dua periode kepemimpinan negara pada tahun 2018. Hal ini menyiapkan jalan baginya untuk menjabat sebagai kepala negara pada 2023. Mayoritas pengamat politik China memandang bahwa hal tersebut merupakan usaha Xi Jinping untuk menjadikan dirinya pemimpin seumur hidup – sama seperti Mao Zedong.

Keempat, Xi Jinping merumuskan arah kebijakan luar negeri China dalam sebuah prakarsa yang disebut Komunitas Masa Depan Bersama untuk Manusia (KMBM). Di dalam KMBM ada prakarsa-prakarsa turunan seperti Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI), Prakarsa Pembangunan Global, Prakarsa Keamanan Global, dan Prakarsa Peradaban Global. Jika diperhatikan lebih jeli, KMBM ini mengandung muatan marxisme dan pemikiran tradisional China yang kental. Secara singkat, muatan marxisme tampak dalam keyakinan akan dialektisme sejarah bahwa negara sosialis pada akhirnya akan memenangkan persaingan melawan negara kapitalis dan memimpin dunia. Sedangkan muatan pemikiran tradisional China tampak dalam prinsip *Tianxia* (Majalah *Basis*, No. 01-02, Tahun ke-70,

2021). Dalam prinsip *Tianxia* ini terdapat unsur hierarki yang tidak sesuai dengan norma negara-bangsa (*nation-state*) seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Westphalia tahun 1648.

Walaupun ada juga unsur-unsur konstruktif dalam KMBM, tapi prinsip *Tianxia* ini cukup mengusik dan memberikan tantangan bagi norma negara-bangsa yang sebenarnya selalu diserukan China. Sejak berdirinya pada tahun 1949, China selalu menekankan kesetaraan antar negara. China menjadi salah satu pelopor Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang melahirkan Dasasila Bandung yang intinya menolak kolonialisme dan menjunjung tinggi kedaulatan semua negara, baik besar maupun kecil, maju maupun berkembang.

Hingga saat ini China masih terus meningkatkan kapasitasnya di segala bidang. Sampai batas mana negara tersebut akan memegang teguh pakem internasional yang adil dan setara? Apakah kebangkitan China harus berujung pada posisinya sebagai hegemoni yang mengabaikan kedaulatan negara-negara lain, terutama yang lebih kecil dari segi militer dan ekonomi?

Presiden Prabowo keluar dari pakem?

Dilihat dari proses pencalonannya, pasangan Prabowo dan Gibran jelas keluar dari pakem. Drama politik sebelum pilpres terjadi ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan undang-undang terkait batas usia capres-cawapres yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo.

Setelah Prabowo dilantik menjadi presiden, beliau juga melakukan hal-hal yang di luar kelaziman. Secara khusus, sesuai dengan minat penulis, artikel ini menyoro kebijakan luar negeri yang terkesan mengabaikan ASEAN. Prabowo mengangkat menteri luar negeri dari Partai Gerindra, yaitu Sugiono. Pilihan ini di satu pihak dapat dipahami karena Prabowo sangat berminat pada politik luar negeri dan ingin memercayakan urusan ini kepada orang kepercayaannya. Di lain pihak, pilihan ini juga di luar pakem karena Sugiono menjadi menteri luar negeri pertama yang nondiplomat sejak Alwi Shihab 1991-2001.

Debut pertama diawali dengan memasukkan Indonesia sebagai mitra BRICS, kemudian anggota penuh dari organisasi tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis, sebagian besar opini ahli di media arus utama cenderung mengkritik kebijakan Indonesia ini. Penulis sendiri cenderung bersikap netral dalam menyikapi langkah Presiden ini. Namun, yang lebih

memprihatinkan adalah selera pemerintahan baru yang rendah terhadap penguatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Sebagai negara terbesar dalam ASEAN yang sering kali mendapat predikat sebagai pemimpin alami organisasi tersebut, Indonesia memiliki peran yang besar dan unik. Para diplomat Indonesia sejak dalam tahap pembinaan awal telah dididik untuk memandang ASEAN sebagai fondasi diplomasi, garis terdepan diplomasi nasional. Sayangnya, Prabowo dalam Manifesto Partai Gerindra memandang ASEAN sebagai "artefak sejarah diplomasi". Hal ini juga tampak dari Pernyataan Pers Tahunan Menlu Sugiono pada 10 Januari 2025 yang tidak memadai dalam membahas peran Indonesia di ASEAN.

Pengabaian ASEAN merupakan langkah keluar dari pakem yang memprihatinkan. Bagaimana mungkin Presiden Prabowo yang memiliki aspirasi besar agar Indonesia semakin berpengaruh di dunia internasional tetapi mengabaikan diplomasi di kawasannya sendiri? Bagaimana mungkin legasi Indonesia yang sangat kuat di ASEAN sebagai pendiri dan mediator berbagai masalah regional (Kamboja-Vietnam, Kamboja-Thailand, pemberontakan Moro di Filipina Selatan, krisis Myanmar, isu Laut China Selatan) hendak dilemahkan oleh pemerintahan yang mengklaim sangat memahami dan berminat kepada isu-isu global? Bagaimana mungkin kita ingin lebih aktif di organisasi-organisasi macam OECD, BRICS, tetapi tidak hadir secara signifikan di organisasi di kawasan sendiri?

Menghadapi situasi dunia yang tidak menentu, ada baiknya kita semua kembali ke pakem. Trump sebaiknya menghormati norma internasional tentang kedaulatan negara dan berusaha konsisten dengan politik luar negeri AS yang telah dirintis para pendahulunya. Xi Jinping juga sebaiknya tidak begitu saja mengabaikan reformasi dan keterbukaan yang telah dijaga oleh para pembaharu China.

Demikian juga Prabowo sebaiknya kembali menegaskan kepemimpinan Indonesia di ASEAN demi menyelesaikan masalah-masalah besar kawasan, seperti krisis di Myanmar dan Laut China Selatan. Tidak ada yang salah dengan pakem, sebaliknya dengan menjaganya, kita mendapatkan kesejukan, keteraturan, dan menjadi lebih berbudaya – seperti kehidupan di Kecamatan Pakem. ●

Klaus Heinrich Raditio, Ph.D.
dari Department of Government and
International Relations, The University of Sydney